

DAFTAR PUSTAKA

- Algin Eshar Perdana (2021). Perspektif Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Sebagai Modal Awal Pembangunan Nasional. Artikel Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia.
- Almira. N. S. (2021). Perencanaan Koridor Perdagangan Jalan Urip Sumoharjo. Kota Yogyakarta dengan Adaptasi Konsep Livable Street (Skripsi. Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada
- Ardiani. S. (2020). Optimalisasi Pemanfaatan Aset Pemerintah sebagai Upaya Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Kota Bandung. Jurnal Galuh Justisi. 8(1). 45–59. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/410>
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. (2025). Perkembangan Pariwisata Yogyakarta Desember 2024. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Yogyakarta. (2024. 19 Februari). Optimalisasi Aset Pemkot untuk Tingkatkan PAD. Warta Jogja. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/36388>
- Dwiriawati. (2013). Kelayakan Proposal Investasi Pembangunan Reksa Arcade Yogyakarta (Tesis Magister. Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada Repository.
- Falachi. F., Fitriani. E., Rachmawati. D., & Haryanto. A. (2017). Membaca kembali ruang publik Malioboro: Analisis peruntukan kebijakan penataan pedestrian Malioboro [Makalah]. Universitas Gadjah Mada. <https://www.academia.edu/35683394/>
- Hariyanto. H., Astutik. Y. S., & Saputra. A. J. (2020). Analisis Kelayakan Studi Pada Proyek Pembangunan Ruko di Batam (Studi Kasus Pembangunan Ruko Papa Mama Residence). Jurnal Ekonomi & Bisnis. 7(2). 22–30.
- Husnan. S. (1994). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. UPP STIM YKPN.
- Irwan. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Jurnal Manajemen dan Pelayanan Publik. 7(1). 45–53. <https://jurnal.unpad.ac.id/jmpp/article/view/13553>.
- Meilani. H. (2019). Hambatan Dalam Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia dan Solusinya. Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Vol. XI. No.19/I/Puslit/Oktober/2019. hlm 19-24.
- Meima. M. (2021). Pembentukan Undang Undang Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah. *Wacana Paramarta*. vol. 20. no. 4. 2021. pp. 1-13.
- Noviawati. Evi. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.4 No.1. Hlm 46-61.
- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2025). *Investment Project Ready To Offer: Reksa Arcade*.

- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2007). Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha.
- Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di sepanjang koridor Jalan Jenderal Sudirman–Urip Sumoharjo–Adisucipto
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2009 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket.
- Purnama Sari, A., & Bastian, I. (2021). Analisis Kelayakan Keuangan dan Sosial Ekonomi Investasi Pemerintah: Studi Kasus Revitalisasi Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(3), 87–102.
- Purnomo, O & Suyatno. (2024). Hambatan Kebijakan Investasi Indonesia untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui *Omnibus Law*. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2202-2209.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Rizka, A. (2022). Pra Studi Kelayakan Aset Daerah sebagai Rest Area (Studi Kasus Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bantul di Jalan Srandakan) (Skripsi. Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada.
- Sari, I. D. (2018). Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kota Lama Semarang Berdasarkan Elemen Maryani. *Jurnal Pariwisata Terapan*, 2(1), 11–20.
- Siregar, H. (2008). Penilaian Aset dalam Konteks Pemerintahan. *Jurnal Penilaian Properti dan Bisnis*, 6(3), 517–528.
- Siregar, H. (2018). Manajemen Aset Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Sutika, I. K., Wiksuana, I. G. B., & Artini, L. G. S. (2019). Studi Kelayakan Pembangunan Pusat Perbelanjaan pada Aset Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 10(2), 790–805.
<https://media.neliti.com/media/publications/165316-ID-studi-kelayakan-pembangunan-pusat-perbel.pdf>
- Thimothy, D. J. (2011). *Tourism and Shopping: A Global Perspective*. Routledge.
- Umam, K., Wardiningsih, R., & Noviawan, L. A. (2024). Analisis Pengelolaan Aset Idle di Pemerintah Daerah. *Jurnal Sains Manajemen dan Akuntansi*, 16(2).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).